

Dampak Revitalisasi Kota Lama Semarang sebagai Destinasi Wisata Heritage : Perspektif Kebijakan Konservasi

Alifah Nadine Griselda¹, Teguh Yuhwono²

Email: alifahnadin2004@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang sebagai destinasi wisata heritage menghadapi dilema antara pelestarian warisan budaya kolonial Belanda dengan arsitektur bergaya Nieuwe Bouwen dan Indo-Eropa yang autentik dan pemanfaatan ekonomi di tengah urbanisasi masif serta ancaman lingkungan seperti banjir rob dan penurunan tanah, sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya serta Perda Kota Semarang No. 2/2020. Penelitian ini difokuskan pada Kota Lama Semarang dibandingkan Kota Tua Jakarta karena keunikan konteksnya sebagai kota pelabuhan strategis di Jawa Tengah yang mengalami degradasi fisik lebih parah, infrastruktur drainase buruk, dan urgensi revitalisasi terkini melalui Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL), berbeda dengan Kota Tua Jakarta yang telah mapan sebagai kawasan UNESCO World Heritage dengan pariwisata komersial matang sejak lama. Daya tarik penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan konservasi menggunakan model Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi), metodologi deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BPSKL, pelaku usaha, observasi partisipatif, serta triangulasi data sekunder dari laporan revitalisasi urban heritage. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan konservasi berjalan cukup baik dengan komunikasi antar-stakeholder yang terkoordinasi, meski terhambat oleh keterbatasan anggaran, koordinasi birokrasi lintas-instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat lokal. Revitalisasi berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan 20-30% per tahun, mendorong ekonomi kreatif melalui adaptive reuse bangunan heritage menjadi kafe seni, galeri, dan workshop budaya, tetapi juga memunculkan dampak negatif berupa gentrifikasi yang menggusur pedagang tradisional, overtourism pada akhir pekan, serta risiko erosi autentisitas arsitektur akibat modifikasi komersial berlebihan. Kesimpulan merekomendasikan penguatan peran BPSKL dan DISBUDPAR melalui insentif fiskal untuk adaptive reuse berkelanjutan, partisipasi multistakeholder yang inklusif, dan sistem monitoring berbasis Outstanding Universal Value (OUV) UNESCO untuk mencapai keseimbangan optimal antara pelestarian nilai historis dan pemanfaatan ekonomi jangka panjang.

Kata kunci: Revitalisasi Kota Lama Semarang, Wisata Heritage, Kebijakan Konservasi, Implementasi Kebijakan Edward III, Pelestarian Cagar Budaya

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The revitalization of Semarang's Old Town as a heritage tourism destination faces a dilemma between preserving Dutch colonial cultural heritage with its authentic Nieuwe Bouwen and Indo-European architecture and economic development amidst massive urbanization and environmental threats such as tidal flooding and land subsidence, as stipulated in Law No. 11/2010 concerning Cultural Heritage and Semarang City Regulation No. 2/2020. This research focuses on Semarang's Old Town compared to Jakarta's Old Town due to its unique context as a strategic port city in Central Java that has experienced more severe physical degradation, poor drainage infrastructure, and the urgency of recent revitalization through the Old Town Site Management Agency (BPSKL). This contrasts with Jakarta's Old Town, which has been established as a UNESCO World Heritage site with a long-standing commercial tourism presence. The research's appeal lies in the analysis of conservation policy implementation using the Edward III model (communication, resources, disposition, bureaucratic structure), a qualitative descriptive methodology with in-depth interviews with the Department of Culture and Tourism, BPSKL, and business actors, participatory observation, and triangulation of secondary data from urban heritage revitalization reports. The results of the study indicate that the implementation of conservation policies has been quite successful with coordinated communication between stakeholders, although hampered by budget constraints, cross-agency bureaucratic coordination, and low awareness of the local community. Revitalization has succeeded in increasing tourist visits by 20-30% per year, encouraging the creative economy through the adaptive reuse of heritage buildings into art cafes, galleries, and cultural workshops, but has also given rise to negative impacts in the form of gentrification that displaces traditional traders, overtourism on weekends, and the risk of erosion of architectural authenticity due to excessive commercial modifications. The conclusion recommends strengthening the role of BPSKL and DISBUDPAR through fiscal incentives for sustainable adaptive reuse, inclusive multi-stakeholder participation, and a monitoring system based on UNESCO's Outstanding Universal Value (OUV) to achieve an optimal balance between historical preservation and long-term economic benefits.

Keyword: *Revitalization of Semarang Old Town, Heritage Tourism, Conservation Policy, Implementation of Edward III Policy, Cultural Heritage Preservation*

PENDAHULUAN

Revitalisasi kawasan bersejarah telah menjadi isu strategis dalam tata kelola perkotaan di berbagai negara selama dua dekade terakhir. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap tekanan urbanisasi masif yang kerap menggeser nilai-nilai historis dan kultural suatu kawasan. Kawasan

yang dulunya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial sering kali terpinggirkan akibat perkembangan kota yang berorientasi pada modernitas. Dalam konteks ini, revitalisasi hadir bukan sekadar untuk mempercantik fisik kota, melainkan sebagai upaya menyeluruh untuk menghidupkan kembali ruang-ruang sejarah yang pernah menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Melalui proses ini, kota tidak hanya membangun ulang bangunan, tetapi juga merajut kembali identitas, memori kolektif, dan karakter khas yang pernah mengakar dalam kehidupan warganya (Firdausyah & Dewi, 2021). Secara global, berbagai kota telah menjadikan revitalisasi kawasan lama sebagai strategi kebangkitan identitas dan ekonomi daerah, seperti Old Town Warsaw di Polandia dan The Bund di Shanghai, yang berhasil menghidupkan kembali fungsi sosial dan ekonomi kawasan tanpa menghapus nilai historisnya.

Di Indonesia, perhatian terhadap revitalisasi kawasan heritage menguat seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Regulasi ini menegaskan bahwa pelestarian warisan budaya bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, revitalisasi kawasan bersejarah menjadi instrumen kebijakan yang tidak hanya mengarah pada pemugaran bangunan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal berbasis budaya. Salah satu kawasan yang paling aktif menjalankan agenda revitalisasi ini adalah Kota Lama Semarang, yang dikenal sebagai *Little Netherland* sebuah kawasan bersejarah dengan warisan arsitektur kolonial Belanda

bergaya Nieuwe Bouwen dan Indo-Eropa yang hingga kini masih terjaga. Kawasan ini menjadi saksi hidup perjalanan sejarah kolonial di Nusantara, sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, dan kehidupan sosial yang dinamis pada masanya.

Namun seiring berjalannya waktu, perubahan fungsi kota dan pergeseran pusat ekonomi menyebabkan Kota Lama kehilangan vitalitasnya. Banyak bangunan tua yang terbengkalai, infrastruktur mengalami kerusakan, serta citra kawasan tergerus menjadi ruang yang kumuh, gelap, dan rawan. Permasalahan lingkungan seperti banjir rob dan penurunan tanah turut memperparah kondisi kawasan. Situasi ini mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan revitalisasi secara intensif, termasuk dengan membentuk Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama. Program revitalisasi mencakup penataan infrastruktur, penggantian paving, ducting kabel bawah tanah, pembangunan landmark baru, hingga pengembangan ruang publik yang mengundang partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif.

Keberhasilan revitalisasi mulai terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan secara konsisten sebesar 20–30% per tahun, serta tumbuhnya sektor ekonomi kreatif di kawasan tersebut. Kota Lama Semarang bahkan sempat melampaui jumlah kunjungan destinasi unggulan lainnya di Jawa Tengah pada periode-periode tertentu. Namun di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara komprehensif: apakah revitalisasi yang dilakukan benar-benar selaras dengan prinsip kebijakan konservasi dan pelestarian nilai budaya yang terkandung di dalamnya? Pertanyaan ini penting karena banyak kota di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi dilema antara pelestarian dan komersialisasi kawasan heritage. Dalam banyak kasus, revitalisasi justru memunculkan paradoks di satu sisi kawasan menjadi lebih hidup dan menarik, namun di sisi lain kehilangan keaslian dan makna budayanya karena orientasi ekonomi yang berlebihan (Mahindra & Megawati, 2022).

Fenomena gentrifikasi mulai tampak di Kota Lama, di mana masyarakat yang dahulu bermukim di sekitar kawasan perlahan tersisih akibat kenaikan harga sewa. Fokus kebijakan yang lebih dominan pada aspek visual dan estetika seperti mempercantik tampilan bangunan dan memperbaiki infrastruktur jalan dinilai belum cukup memperhatikan nilai-nilai kultural yang

menyertainya. Minimnya media interpretasi sejarah seperti papan informasi, museum interaktif, dan narasi kawasan menyebabkan pengunjung lebih banyak memperoleh pengalaman wisata yang bersifat estetis daripada edukatif. Selain itu, permasalahan overtourism pada akhir pekan, kompleksitas status kepemilikan bangunan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi tantangan struktural yang terus menghambat efektivitas kebijakan konservasi di lapangan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti isu revitalisasi Kota Lama Semarang, namun sebagian besar masih terfokus pada dimensi fisik, pariwisata, atau implementasi kebijakan secara parsial. Bhakti Sulistiyo (2013) membahas kebijakan konservasi bangunan bersejarah tanpa menggali dampak sosial-kultural secara mendalam. Galang Adit Hustad (2017) menilai keberhasilan revitalisasi dari indikator fisik dan ekonomi semata. Ardiana Yuli Puspitasari (2018) menyoroti pengelolaan kawasan dalam konteks nominasi Warisan Dunia UNESCO, sementara Salsabila Alya Putri (2021) menganalisis implementasi kebijakan berbasis konsep UNESCO tanpa meninjau keberlanjutan nilai konservasi secara komprehensif. Dari berbagai penelitian

tersebut, terdapat kesenjangan yang signifikan belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis dampak revitalisasi dari perspektif kebijakan konservasi, yakni bagaimana kebijakan tersebut berperan menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, transformasi sosial-ekonomi, dan pengembangan wisata heritage secara berkelanjutan.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis dampak revitalisasi Kota Lama Semarang sebagai destinasi wisata heritage dalam perspektif kebijakan konservasi dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980). Model ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis kompleksitas implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor lintas instansi, sebagaimana yang terjadi di Kota Lama Semarang. Keempat variabel dalam model Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan konservasi berhasil diimplementasikan dan menghasilkan dampak yang nyata, baik terhadap pelestarian warisan budaya maupun transformasi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam

kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, BPSKL, pelaku usaha, dan wisatawan, serta dilengkapi dengan observasi partisipatif dan triangulasi data sekunder dari laporan revitalisasi urban heritage.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik di bidang kebijakan publik dan konservasi budaya, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan konservasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan agar revitalisasi Kota Lama Semarang dapat menjadi model pengelolaan kawasan heritage yang menyeimbangkan pelestarian nilai historis, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial secara optimal bagi generasi masa kini dan mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak revitalisasi Kota Lama Semarang dari perspektif kebijakan konservasi. Situs penelitian berfokus pada kawasan Kota Lama Semarang yang dipilih karena keunikan nilai historisnya sebagai kawasan warisan kolonial Belanda, proses revitalisasi yang tengah berjalan intensif,

serta urgensinya sebagai kawasan cagar budaya yang diatur oleh Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan tujuh informan yang dipilih secara purposif, meliputi perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Sekretaris Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL), pelaku usaha di kawasan, serta wisatawan domestik dan masyarakat lokal. Kedua, observasi partisipatif terhadap kondisi fisik kawasan, aktivitas wisata, dan dinamika interaksi sosial antara warga, pengunjung, dan pelaku usaha. Ketiga, dokumentasi melalui dokumen resmi seperti UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2020, laporan revitalisasi pemerintah, serta studi literatur akademik yang relevan.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni dengan membandingkan data dari berbagai informan, mencocokkannya dengan hasil observasi lapangan, serta mengonfirmasinya melalui data sekunder yang kredibel. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi,

menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka analitis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Konservasi

Berdasarkan analisis keempat variabel Edward III, implementasi kebijakan konservasi pada revitalisasi Kota Lama Semarang menunjukkan gambaran yang relatif positif namun belum optimal. Pada variabel komunikasi, landasan regulatif berupa SK Walikota dan Perda RTBL telah menjadi dasar transmisi kebijakan yang terstruktur, namun masih terhambat oleh fragmentasi koordinasi antar-lembaga dan terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat luas. Pada variabel sumber daya, kolaborasi lintas instansi antara Disbudpar, BPSKL, Dinas PU, Disperkim, dan DLH mencerminkan upaya mobilisasi sumber daya yang sinergis, meski keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis pelaksana masih menjadi hambatan nyata. Pada variabel disposisi, komitmen BPSKL dan Disbudpar dalam mempertahankan prinsip living heritage di tengah tekanan komersialisasi mencerminkan orientasi positif, meski kesenjangan disposisi di kalangan pelaku usaha masih perlu dikelola

secara partisipatif. Pada variabel struktur birokrasi, pembentukan BPSKL sebagai lembaga koordinatif lintas instansi merupakan inovasi strategis, meskipun potensi tumpang tindih kewenangan di antara lebih dari delapan instansi yang terlibat tetap menjadi tantangan struktural yang berkelanjutan.

2. Dampak Revitalisasi terhadap Pelestarian Warisan Budaya dan Nilai Historis

Revitalisasi Kota Lama Semarang telah menghasilkan capaian signifikan pada aspek fisik dan fungsional kawasan. Restorasi bangunan cagar budaya seperti Oudetrap, pengembangan skema adaptive reuse, penataan infrastruktur, serta penyelenggaraan program budaya seperti Festival Kota Lama dan Car Free Night menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kawasan heritage. Revitalisasi berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan secara konsisten dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan bangunan bersejarah sebagai kafe seni, galeri, dan ruang kreatif. Namun demikian, revitalisasi belum sepenuhnya mengangkat nilai historis secara substantif. Minimnya media interpretasi sejarah seperti papan informasi, museum interaktif, dan narasi kawasan menyebabkan pengunjung

memperoleh pengalaman yang lebih bersifat estetik daripada edukatif. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pendekatan value-based conservation yang tidak hanya melestarikan fisik bangunan, tetapi juga merawat makna kultural dan esensi historis kawasan.

3. Pengaruh Revitalisasi terhadap Transformasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal

Revitalisasi memberikan dampak positif yang nyata terhadap transformasi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Tumbuhnya sektor jasa berbasis pariwisata mulai dari kafe, galeri seni, hotel, jasa fotografer, hingga penyewaan kostum tradisional mencerminkan efek multiplier ekonomi yang signifikan dan membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Secara sosial, perubahan citra kawasan dari yang sebelumnya dikenal gelap dan rawan menjadi ruang publik yang bersih, aman, dan inklusif telah memperkuat kohesi sosial serta mendorong pola interaksi baru antar warga, wisatawan, dan pelaku usaha. Namun demikian, manfaat ekonomi belum terdistribusi secara merata. Instrumen perlindungan bagi kelompok rentan seperti pedagang tradisional dan komunitas berpenghasilan rendah masih belum memadai, sehingga kenaikan nilai ekonomi

kawasan berisiko mendorong gentrifikasi. Sistem komunikasi kebijakan juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat terdampak, menyebabkan sebagian warga tidak mengetahui hak dan peluang yang seharusnya dapat mereka akses.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi Kota Lama Semarang secara umum telah berjalan positif, namun belum optimal secara menyeluruh dalam ketiga aspek yang diteliti.

Implementasi kebijakan konservasi melalui keempat variabel Edward III (1980) menunjukkan kemajuan yang signifikan. Komunikasi antar-instansi telah terstruktur melalui SK Walikota dan Perda RTBL, sumber daya dimobilisasi secara sinergis melalui kolaborasi lintas lembaga, disposisi pelaksana mencerminkan komitmen kuat terhadap prinsip *living heritage*, dan BPSKL hadir sebagai inovasi kelembagaan koordinatif yang strategis. Namun keterbatasan anggaran, fragmentasi koordinasi, dan ketidakseragaman SOP masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat.

Revitalisasi berhasil menghasilkan capaian signifikan pada pelestarian fisik kawasan melalui restorasi bangunan, pengembangan *adaptive reuse*, dan

penyelenggaraan program budaya. Meski demikian, nilai historis kawasan belum terangkat secara substantif akibat minimnya media interpretasi sejarah, sehingga pengunjung lebih memperoleh pengalaman estetis daripada edukatif.

Revitalisasi memberikan dampak nyata terhadap transformasi sosial-ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan citra kawasan. Namun manfaatnya belum merata kelompok rentan seperti pedagang tradisional belum terlindungi secara memadai dari risiko gentrifikasi, dan sistem komunikasi kebijakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat terdampak.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi konservasi berbasis nilai, optimalisasi fungsi edukatif kawasan, pemberdayaan masyarakat lokal secara inklusif, serta perencanaan berkelanjutan yang menyeimbangkan pelestarian autentisitas, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Dampak Revitalisasi Kota Lama Semarang Sebagai Destinasi Wisata Heritage

Dalam Perspektif Kebijakan Konservasi” maka beberapa hal perlu diperbaiki, seperti :

1. Penguatan Regulasi Konservasi Berbasis Nilai, sebab Pemerintah Kota Semarang perlu menetapkan regulasi teknis yang mewajibkan penyediaan media interpretasi sejarah (papan informasi, QR code, dan narasi historis terstandar) pada setiap bangunan cagar budaya di Kota Lama Semarang.
2. Optimalisasi Fungsi Edukatif Kawasan sebagai pengelola kawasan, diperlukannya pengembangan sistem interpretasi heritage terpadu berbasis riset akademik guna memperkuat pemahaman publik terhadap nilai historis dan budaya kawasan dalam bentuk kajian.
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal karena pengembangan wisata heritage harus disertai strategi pembekalan guna pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif agar manfaat revitalisasi dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.
4. Perencanaan Berkelanjutan dan Pengawasan Berkala, diperlukan roadmap pengelolaan jangka panjang yang menyeimbangkan pelestarian autentisitas, pertumbuhan ekonomi,

serta pengendalian komersialisasi kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). *Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146-150.
- Buchori, A. (2022). *Daya Tawar Warisan Budaya Kota Lama Semarang Sebagai Daya Tarik Wisata Melalui Program Revitalisasi. Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 16(2), 127. <https://doi.org/10.47256/kji.v16i2.163>
- DEWANTARA., G. A. H. (2017). Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(4), 1–9.
- Fikri, M. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13057–13065. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27042>
- Firdausyiah, A. G., & Dewi, S. P. (2021). *Pengaruh Revitalisasi Terhadap Pola Ruang Kota Lama Semarang. Jurnal Riptek*, 15(1), 17–27. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v15i1.104>
- Mahindra, D. A., & Megawati, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (Studi Pada Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya). Publika*, 219–230. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p219-230>

- Malik, R. ., Susanti, R., Hidir, A., Resdati, Ihsan, M. ., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 33-41. <https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue1page33-41>
- Muqsit, F. Al, Setiadi, R., & Lo, A. (2024). *Waste Management in Heritage Tourism Area: Perspectives from Visitors and Waste Management Operators. The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i1.524>
- Putri, S. A., Setiyono, B., & Ardianto, H. T. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG SEBAGAI WORLD HERITAGE SITE VERSI UNESCO.
- Putri, S. N. A. K., & Sugiri, A. (2022). *Kajian Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang Periode Tahun 2019: Persepsi Wisatawan dan Ahli Terhadap Daya Tarik Wisata. Tataloka*, 24(3), 214–230. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.3.214-230>
- Sonaesti, C., & Purwanto, E. (2022). *Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang: Antara Harapan Dan Kenyataan. Jurnal Arsitektur ARCADE*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.31848/arcade.v6i1.813>
- Sulistyo, B., Widayati, W., & Astuti, P. (2013). *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Dan Konservasi Bangunan Bersejarah Kawasan Kota Lama Di Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies*, 2(3), 456–466. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3095/0>
- Brown, A. (2021). *Cultural Heritage and Community Engagement: Strategies for Sustainable Tourism*. Heritage Studies Press.
- Puspitasari, A. Y., & Khasana Ramli, W. O. S. (2018). *Masalah Dalam Pengelolaan Kota Lama Semarang Sebagai Nominasi Situs Warisan Dunia. Jurnal Planologi*, 15(1), 96. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i1.2764>
- UNESCO. (2015). *Sustainable Heritage Tourism Framework*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Karismaningtyas Widhiati. (2015). *Teori Implementasi Edward III*. <https://kwidhiati.blogspot.com/2015/04/teori-implementasi-edward-iii.html>.
- Ejournal3 Undip. (2021). *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Lama Semarang sebagai World Heritage Site Versi UNESCO*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/32729>.
- Indra Achmadi. (2014). *Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III*. <https://indraachmadi.blogspot.com/2014/05/teori-implementasi-kebijakan-george-c.html>.
- Scribd. (2025). *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kota Lama Semarang*. <https://id.scribd.com/document/687974719/IMPLEMENTASI-KEBIJAKAN-REVITALISASI-KOTA-LAMA-SEMARANG-SEBAGAI-WORLD-HERITAGE-SITE-VERS>.

- Eryan, A., Marbun, A., Nugroho, A. A., Jane, G., Handayani, M. M., Qomariyah, N., Nuruliawati, Fajrini, R., & Safira, S. H. (2019). Arah baru kebijakan penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.
- Indra, S. R. (2023). Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan kearifan lokal sebagai kontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2).
- Nastiti, S. A., Safitri, R., Agustina, L. A., & Pramasha, R. R. (2024). Peran kebijakan ekonomi dalam konservasi sumber daya alam: Analisis literatur terkini. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Ashworth, G.J. (2011). Preservation, Conservation and Heritage.
- Husta, D. G. (2017). Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kota Semarang.
- Setiawan, A. S., & Batubara, R. P. (2022). Penerapan Prinsip Ekowisata di Situ Gede sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan Kota Bogor. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 4(2), 45. <https://doi.org/10.37253/altasia.v4i2.6758>
- Tofani, I., Silitonga, T., Afrianita, Y., & Tesiherdawati. (2022). *Jurnal pelita kota*. 3(2), 189–206.
- Yulia, R., Erawati, M., Asnan, G., & Nopriyasman. (2017). Revitalisasi Kawasan Kota Tua Padang Sebagai Salah Satu Alternatif Wisata Sejarah di Kota Padang. *Bakaba*, 6(2), 17–23.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama.
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta
- Azizah, N. (2022). Kajian kesesuaian komponen urban heritage tourism kawasan Kota Lama Semarang (Tugas Akhir). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang.
- Dilawari, Y. B., et al. (2025). Analisis pengembangan heritage tourism pada kawasan Kota Lama Semarang. *Jurnal Arsitekta*, 7(1), 83-90.
- Istikhomah, I. A., & Adnyana, M. B. (2025). Revitalisasi Kota Lama Surabaya: Pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi komunitas lokal. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 6(2), 1-8.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Kota Lama Semarang: Merawat warisan kolonial, menjangkau milenial*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kota-lama-semarang-merawat-warisan-kolonial-menjangkau-milenial> (Diakses 27 Desember 2024).
- Sari, I. D. R. (2012). Kota Lama Semarang: Situs sejarah yang terpinggirkan (Old City of Semarang: The abandoned

historical site). *Berkala Arkeologi*, 32(2), 195-208.

Trifena, L. J., & Dewi, S. P. (2021). Pengaruh revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah dan Kota)*, 10(4), 260-271.

Yuliati, D. (2019). Mengungkap sejarah Kota Lama Semarang dan pengembangannya sebagai aset pariwisata budaya. *ANUVA*, 3(2), 157-171.